TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JAMBU – KAYEN KIDUL – KEDIRI

TAHUN 2013

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Pada Program Studi PPKn

Oleh :

TUTUT NURVITA S.

NPM: 08.1.01.03.0007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2015

Skripsi Oleh;

TUTUT NURVITA S.

NPM: 08.1.01.03.0007

Judul:

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JAMBU – KAYEN KIDUL – KEDIRI TAHUN 2013

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Jurusan PPKn FKIP UNP Kediri

Tanggal: 18 Mei 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
AGUS WIDODO, M.Pd	SURATMAN, SH. M.Pd
NIDN. 0024086901	NIDN. 0719036102

Skripsi Oleh:

TUTUT NURVITA S.

NPM: 08.1.01.03.0007

Judul:

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JAMBU – KAYEN KIDUL – KEDIRI TAHUN 2013

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Jurusan PPKn FKIP UNP Kediri

Pada Tanggal: 25 MEI 2015

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs.SETYA ADI SANCAYA, M.Pd ( )
2. Penguji I : SURATMAN, SH, M.Pd ( )
3. Penguji II : AGUS WIDODO,S.Pd, M.Pd ( )

Mengetahui,
Dekan FKIP

Dr.HJ.SRI PANCA SETYAWATI,M.Pd
NIDN. 0716046202

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JAMBU – KAYEN KIDUL – KEDIRI

TAHUN 2013

TUTUT NURVITA S.

08.1.01.03.0007

FKIP - PPKn

AGUS WIDODO,S.Pd,M.Pd dan SURATMAN,SH,M.Pd

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

TUTUT NURVITA S. : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jambu Kayen – Kidul Kediri.

Penelitian ini dilatarbelakang hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa untuk mensukseskan Pilkades itu tidaklah mudah.Dalam hal ini peran masyarakat sangatlah penting sekali.Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkades.Kesadaran masyarakat dalam mensuseskan Pilkades tersebut nampak dari keikutsertaannya dalam menyalurkan aspirasinya melalui ikut berpartisipasi dalam Pilkades.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Berapa jumlah masyarakat desa Jambu yang mempunyai hak pilih? (2) Berapa jumlah masyarakat desa Jambu yang mengunakan hak pilih? (3) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif dengan subyek penelitian seluruh masyarakat desa Jambu yang memiliki hak pilih dalam Pilkades.Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi yang berkaitan dengan Pilkades dan diperoleh dari panitia Pilkades.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades sangatlah besar,hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades. (2) Tingkat pendidikan masyarakat ternyata berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades.Tebukti bahwa r hitung 11,341 < 267,41> 7,81 Jadi “Ho ditolak” karena hasil analisis λ^2_h lebih besar dari λ^2_t 1%.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Untuk mensukseskan Pilkades peran serta masyarakat dalam menyalurkan suaranya sangatlah penting,oleh sebab itu partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan dalam Pilkades. (2) Kesadaran masyarakat dalam berpartisispasi perlu terus menerus di tingkatkan supaya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya.

Kata Kunci: Partisipasi politik, Budaya politik, Pemerintahan desa, Pemilihan kepala desa.

Latar Belakang Masalah

Selama ini suksesi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadi mengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dimaklumibersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (B[1], dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut PILKADES,adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat.berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihanKepala Desa. Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.

Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampaye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon.

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades.Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades.Orang apatis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (pamong desa, BPD, pengurus RT maupun pemuka masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh, dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekadar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal. Partisipasi dalam pembangunan desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa, program pembangunan dan APBDes, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, musrenbangdus, musrenbangdes maupun rembug desa. Forum-forum tersebut juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk akses dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Kontrol masyarakat terhadap elite lokal merupakan indikator penting dalam partisipasi, sebagai arena yang memungkinkan elite lokal itu bertanggungjawab dan tanggap terhadap kepentingan warga. Kontrol bisa dilakukan dengan hadirnya institusi pemantau , dan yang lebih penting adalah terlembaganya mekanisme petisi, mosi tidak percaya, atau recalling terhadap elite lokal oleh masyarakat. Masyarakat pemilih (konstituen), misalnya, bisa menarik diri terhadap wakil rakyat yang terbukti tidak bertanggungjawab atau tidak menjalankan amanat rakyat.Tentu saja ruang kontrol masyarakat harus dilegalkan dalam aturan main baik Undang-undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

Membangun masyarakat partisipatif di desa tidak harus berangkat dari titik nol. Meski sebagian besar organisasi di desa bersifat korporatis (bentukan dari atas secara seragam), tetapi organisasi itu bisa dibingkai ulang dengan bersandar pada prinsip partisipasi. Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal (RT, RW, LKMD, LPMD, PKK, arisan, karang taruna, kelompok tani, dan lain-lain), bukan hanya untuk kegiatan seremonial, tetapi juga bisa digunakan sebagai basis partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa.Pilkades dipahami sebagai ajang pertarungan para elit.Fakta menunjukkan keberadaan calon kepala desa (Cakades) masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan elit desa.Kekuasaan sebagai modal dasarnya

untuk meraih kemenangan.Di sini, cakades memainkan sumber kekuasaannya itu untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya.Dalam praktiknya, cakades membutuhkan sebuah strategi penggunaan sumber kekuasaan yang efektif.Melalui pertimbangan pertimbangan yang matang (seperti membuat rancangan strategi sampai pada penggunaannya di lapangan), sumber kekuasaannya itu diharapkan dapat memberikan kekuatan pengaruh yang besar untuk dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Indikator esensi terselenggaranya Pilkades dengan lancar, bermakna pada dua hal, yaitu dari aspek panitia itu sendiri. Fungsi seperti seleksi bakal calon yang dilakukan panitia telah dilaksanakan secara terbuka tidak hanya didominasi elit desa, tetapi melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, yang mana proses dan hasilnya bisa diakses publik secara luas. Selanjutnya dari persfektif kinerja penyelenggaraan, mulai dari proses penganggaran, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala desa, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penentuan saksi di lapangan, pengawasan, penetapan kepala desa terpilih, hingga pengesahan dan pelantikan dapat dipastikan tidak menimbulkan konflik yang berakibat terganggunya kegiatan publik, di mana nilai-nilai kejujuran, profesionalisme semua pihak dan sikap transparansi lebih dikedepankan dari pada kepentingan sesaat lainnya.

Secara yuridis, artinya kepala desa yang terpilih dalam Pilkades adalah yang telah memenuhi semua kualifikasi seperti yang ditentukan dalam UU dan PP tentang Pilkades.Secara politis, kepala desa terpilih selain berkualitas dan yang tidak kalah penting mereka adalah yang bermoralitas, sehingga mampu memenangkan hati semua pihak di desa.Realitasnya berupa penerimaan atau pengakuan secara luas dari kalangan masyarakat.

Dalam kaitannya permasalahan tersebut di atas peneliti mengambil judul penelitian " Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jambu – Kayen Kidul – Kediri ".

Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperjelas suatu masalah dalam penelitian, maka peneliti ingin mengupas dan mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Jambu – Kayen Kidul Tahun 2013. Dalam hal ini terdapat beberapa cakupan atau topik-topik pokok yang hendak peneliti ungkap dalam sebuah penelitian diantaranya :

1. Besarnya jumlah hak pilih warga desa Jambu dalam Pilkades

2. Besarnya jumlah warga desa Jambu yang ikut berpartisipasi dalam Pilkades
3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades

Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan ruang lingkup diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besar jumlah hak pilih warga desa Jambu dalam Pilkades
2. Berapa besar jumlah partisipasi Warga desa Jambu dalam Pilkades
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades

Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan , maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilkades.
2. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan dalam tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkades

Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori yang dipaparkan dan sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Untuk mensukseskan pemilihan kepala desa keterlibatan masyarakat itu sangatlah pentig sekali, karena partisipasi masyarakat sebagai jalan keberhasilan dalam pemilihan kepala desa.Tanpa adanya partisipasi masyarakat pemilihan kepala desa tidaklah mungkin bisa dijalankan.

Dalam pemilihan kepala desa hendaknya pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, jujur dan adil.Guna mensukseskan pemilihan kepala desa pemilihan dilakukan secara langsung dipilih oleh masyarakat dengan mencoblos gambar calon kepala desa pada lembar yang telah disediaan oleh panitia pemilihan kepala desa.Begitu juga dengan perhitungan suara nantinya harus dilakukan dengan jujur, perhitungan dilakukan secara terbuka hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan dalam perhitungan suara.Pemilahan dilakukan secara adil tidak membedabedakan antara calon yang satu dengan yang lainnya.

Tingkat keberhasilan dalam pemilihan kepala desa akan terlihat setelah pemilihan kepala desa berlangsung. Dari sisni dapat diketahui seberapa besar tingkaat partisipasi masyarakat antara yang

ikut berpartisipasi dan yang tidak ikut berpartisipasi. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah biasanya mereka kurang sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa, sehingga mereka cenderung banyak yang tidak mencoblos. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Hipotesis

Setelah dijelaskan masalah-masalah yang menyangkut penelitian ini, maka untuk memecahkan suatu masalah serta penyelesaiannya dijelaskan supaya masalah tersebut dapat diselesaikan.

Hipotesis adalah dugaan sementara yang belum sepenuhnya diakui kebenarannya.Benar atau tidaknya hipotesis harus diuji . Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis digunakan hipotesis alternative dan hipotesis nihil. Dalam hipotesis alternative berbunyi:

“ Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Jambu - Kayen Kidul Tahun 2013”.

Untuk menguji kebenaran hipotesis maka dalam perhitungan analisa data digunakan hipotesis nihil yang berbunyi:

“ Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Jambu - Kayan Kidul Tahun 2013’’.

Teknik Penelitian

Teknik penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena teknik penelitian merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Penentu dan penetapan teknik yang tepat dapat menghindarkan kemungkinan – kemungkinan timbulnya penyimpangan sehingga data yang diperoleh betul – betul obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sutrisno Hadi (1980: 87), “teknik” adalah “ Cara yang fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa teknik penelitian sebagai ilmu yang membicarakan cara – cara atau prosedur yang sistematis.

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan hipotesis yang dilakukan dimuka,maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis. Disebut deskriptif karena penelitian ini akan memberikan gambaran sesuai dengan apa adanya pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Atau dengan kata lain sebab penelitian ini bertolak pada konsep teori tertentu. Konsep teori dijabarkan untuk mendukung

batasan operasioanal pemecahan pada variabel yang akan diatur termasuk merumuskan hipotesisnya. Dari batasan variabel dan hipotesis ini kemudian dikembangkan alat ukur atau instrumen penelitian.Pengukuran terhadap variabel nantinya menghasilkan data yang kuantitatif.

Sedangkan disebut bersifat analisis karena selain memberikan gambaran sesuai dengan yang ada juga akan mengambil kesimpulan yang bersifat inferensial dengan study korelasi. Atau dengan kata lain dari analisa statistik inilah akan ditentukan norma ukuran korelasi atau angka signifikan perbedaan.

Pembahasan Hasil Analisis Data

a. Data jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih ada 4.166 orang

b. Data jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih ada 3.637 orang

Tabel 4.1 Data jumlah masyarakat desa Jambu yang mempunyai hak pilih berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	1.903
SMP	1.104
SMA	530
PT	629
Jumlah	4.166

Tabel 4.2 Data jumlah masyarakat desa Jambu yang menggunakan hak pilih berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	1.490
SMP	1.030
SMA	525
PT	592
Jumlah	3.637

Interprestasi Hasil Analisis Data

jika hasil analisis terhadap harga kritik tabel λ^2_t 1 % $> \lambda^2_h > \lambda^2_t$ 5 % , maka hasil uji hipotesis adalah “Ho ditolak” pada taraf signifikan 5%. Sedangkan jika hasil analisis terhadap harga kritik tabel λ^2_t 1 % $> \lambda^2_h < \lambda^2_t$ 5 % maka hasil uji hipotesis “Gagal menolah Ho” pada taraf signifikan 5%.

Pengujiaan Hipotesis

Dari perhitungan hasil analisis data antara tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi masyarakat didapat r hitung 267,41. Sedangkan r tabel pada taraf signifikan 1% adalah 11,341 dan taraf signifikaan 5% adalah 7,815 dengan demikian r hitung 11,341 < 267,41a > 7,81 Jadi " Ho ditolak" karena hasil analisis λ^2_h lebih besar dari λ^2_t1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Simpulan

Berdasarkan data yang telah terkumpul, dan data dianalisa serta dilakukan pengujian hipotesa, secara umum peneliti telah menjawab semua yang telah tercantum dalam rumusan masalah dengan telah omenguji kebenarannya dan pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih ada 4.166 orang
2. Besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih ada 3.637 orang.
3. Dari perhitungan analisis data antara tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi masyarakat didapat r hitung 267,41. Sedangkan r tabel pada taraf signifikan 1% adalah 11,341 dan taraf signifikan 5% adalah 7,815 dengan demikian r hitung 11,341 <267,41>7,81 Jadi "H_o ditolak" karena hasil analisis λ^2_h lebih besar dari λ^2_t 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Jambu – Kayen Kidul Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel Dan Verba Sidney.1990.*Budaya Politik, Tingkah Laku Demokrasi Lima Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Arikunto,S. 2005. *Management Penelitian*.Jakarta : Rieneka Cipta.Budiardjo, Mariam, *Dasar – Dasar ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1972.

DKK, Kusmanto, Heri, *Pengantar Ilmu Politik*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006.

Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami ilmu Politik*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Suryabrata, S. 2002, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*.

UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintah daerah.

Perda Pemilihan Kepala Desa No. 6 Tahun 2006.